



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

**MENCEGAH KORUPSI DAN POLITISASI BIROKRASI  
UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI MODERN  
DAN PROFESIONAL**

M e n t e r i P A N R B  
**T J A H J O K U M O L O**

Jakarta, 8 Oktober 2020

# VISI & MISI INDONESIA MAJU 2020-2024



## VISI

TERWUJUDNYA INDONESIA  
MAJU YANG BERDAULAT,  
MANDIRI, DAN  
BERKEPRIBADIAN  
BERLANDASKAN GOTONG-  
ROYONG

## MISI

1. PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA
2. STRUKTUR EKONOMI YANG PRODUKTIF, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING
3. PEMBANGUNAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN
4. MENCAPAI LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN
5. KEMAJUAN BUDAYA YANG MENCERMINKAN KEPRIBADIAN BANGSA
6. PENEGAKAN SISTEM HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT, DAN TERPERCAYA
7. PERLINDUNGAN BAGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA
8. PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DAN TERPERCAYA
9. SINERGI PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN

# 5 PRIORITAS KERJA TAHUN KE DEPAN 2019-2024

1

## PEMBANGUNAN SDM

- SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai IPTEK
- Mengundang talenta global

2

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

- Penghubung produksi dan distribusi
- Mempermudah akses wisata
- Mendongkrak lapangan kerja
- Nilai tambah perekonomian

3

## SIMPLIFIKASI REGULASI

- Kendala regulasi disederhanakan, dipotong, dan dipangkas
- Omnibus Law

4

## PENYEDERHANAAN BIROKRASI

- Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level eselon
- Peralihan jabatan struktural menjadi fungsional

5

## TRANSFORMASI EKONOMI

Daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi



## VISI

TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU  
YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN  
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN  
GOTONG-ROYONG

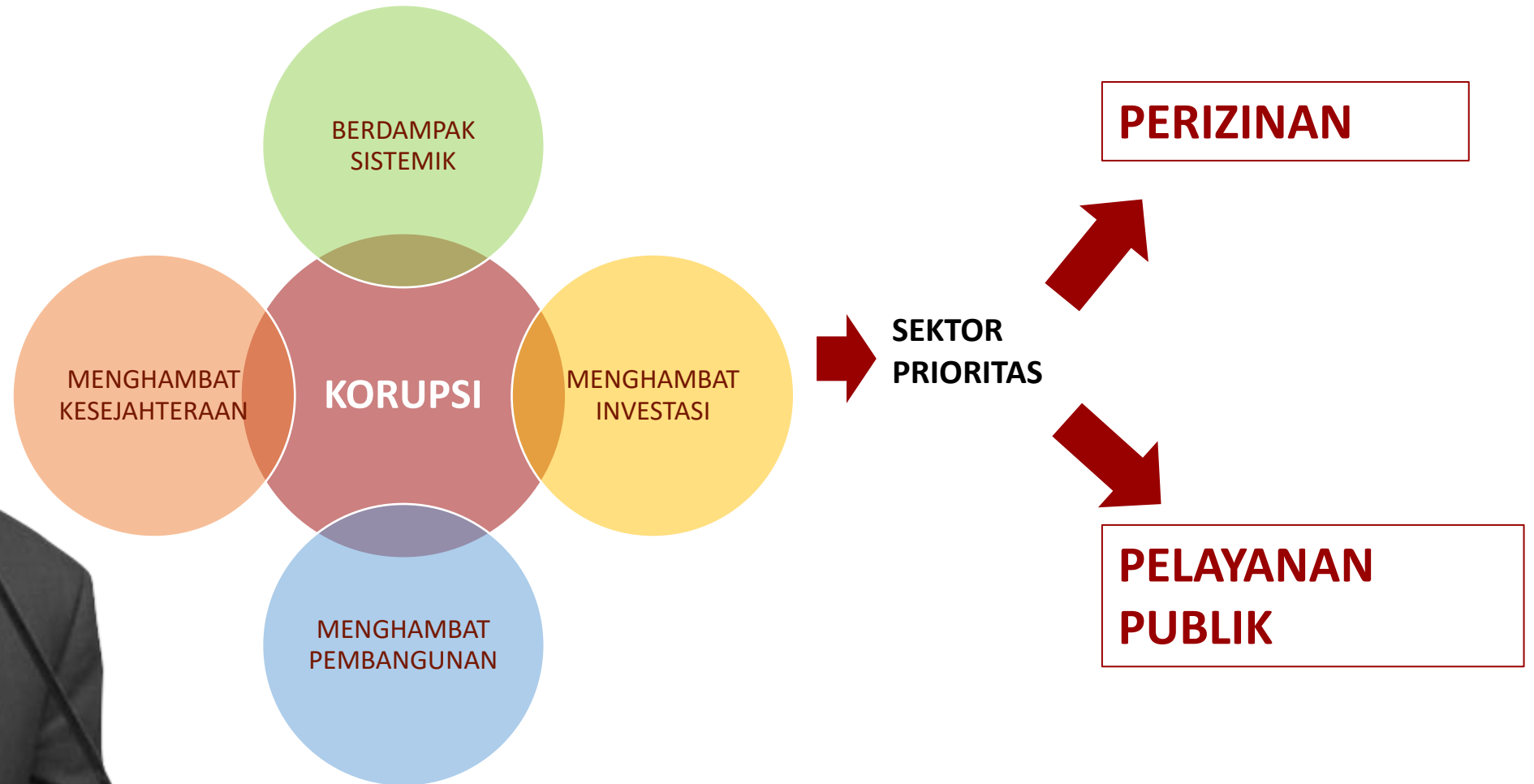


# 7 PERINTAH PRESIDEN UNTUK KABINET INDONESIA MAJU

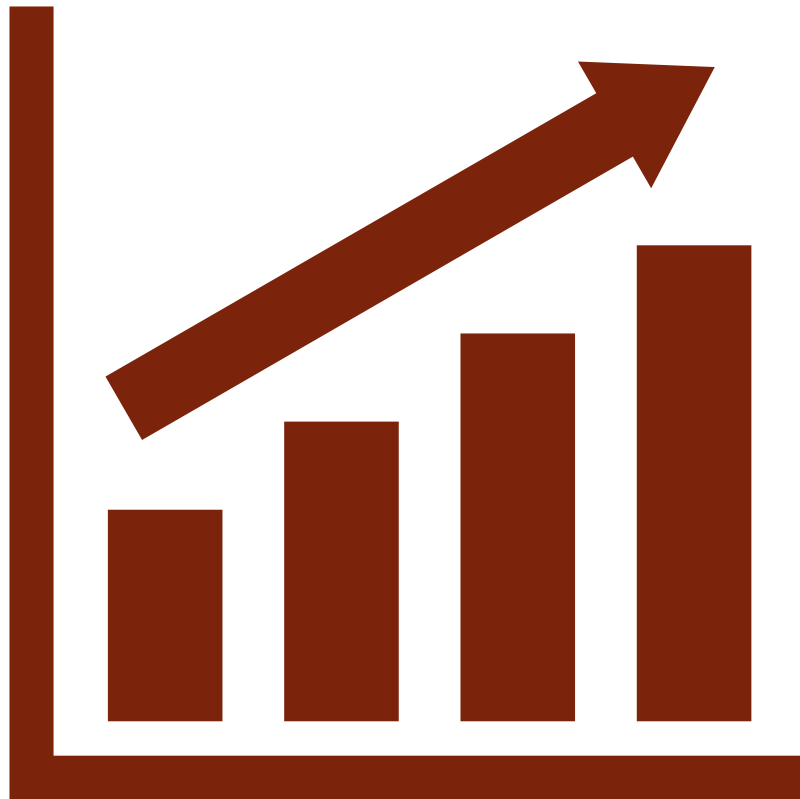
1. Jangan korupsi, ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi!
2. Tidak ada visi misi Menteri, yang ada visi misi Presiden-Wakil Presiden!
3. Kerja cepat, kerja keras, kerja produktif!
4. Jangan terjebak rutinitas yang monoton!
5. Kerja berorientasi pada hasil nyata! Tugas kita tidak hanya menjamin sent, tapi delivered!
6. Selalu cek masalah di lapangan dan temukan solusinya!
7. Semuanya harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang tidak bersungguh-sungguh, tidak serius, bisa saya copot di tengah jalan!



# ARAHAN PRESIDEN TERHADAP AKSI PENCEGAHAN KORUPSI



# LANGKAH-LANGKAH PEMBERANTASAN KORUPSI



**Perbaiki regulasi dan tata kelola kelembagaan**



**Pengawasan efektif dan melibatkan partisipasi publik**



**Penguatan Stranas PK**

- pemetaan area rawan korupsi
- survei persepsi integritas
- kajian-kajian sektor strategis
- pendidikan antikorupsi
- revitalisasi aparat pengawas internal pemerintah (APIP)

# TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI SPBE

## Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE

### Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE

- Transformasi Digital melalui pembangunan SPBE yang mencakup e-planning, e-procurement, e-budgeting, dan e-government juga menjadi **salah satu poin penting untuk mengatasi masalah dan menutup peluang korupsi.**

## QUICK WINS

### MANAJEMEN KEGIATAN PEMERINTAH

INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGADAAN BARANG DAN JASA, KINERJA, MONEV

Koordinator:  
Kementerian PPN/ Bappenas

Target Tahun 2022

### KEPEGAWAIAN

INTEGRASI LAYANAN KEPEGAWAIAN ANTARA BKN DAN INSTANSI PEMERINTAH

Koordinator:  
Kementerian PANRB

Target Tahun 2020

### KEARSIPAN

INTEGRASI E-DOKUMEN PERSURATAN (ARSIP DINAMIS)

Koordinator:  
Kementerian PANRB

Target Tahun 2020

### PENGADUAN MASYARAKAT

INTEGRASI PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinator:  
Kementerian PANRB

Target Tahun 2020

### INFRASTRUKTUR TIK

- PUSAT DATA NASIONAL
- JARINGAN INTRA-PEMERINTAH

Koordinator:  
Kementerian KOMINFO

Target Tahun 2022





**NETRALITAS ASN  
DALAM PELAKSANAAN  
PILKADA SERENTAK  
TAHUN 2020**



**KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,  
MENTERI DALAM NEGERI,  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR 05 TAHUN 2020  
NOMOR 800- 2836 TAHUN 2020  
NOMOR 167/KEP/2020  
NOMOR 6/SKB/KASN/9/2020  
NOMOR 0314**

**TENTANG  
PEDOMAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI,  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**



# PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH

## SINERGI KEMENDAGRI DENGAN KEMENPANRB

Penguatan reformasi birokrasi di daerah melalui kerja sama Kementerian Dalam Negeri selaku pembina pemda dan Kementerian PANRB sebagai pembina reformasi birokrasi.

1

### REFORM THE REFORMERS

Menciptakan *agent of change* sebagai *role model* bagi daerah

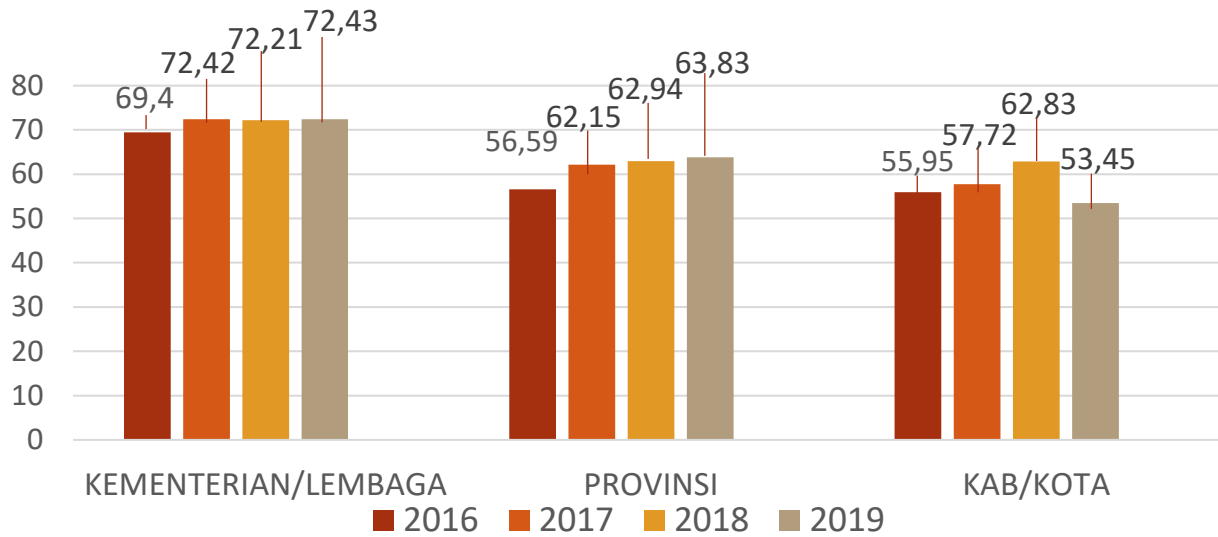
2

### VISI-MISI PRESIDEN

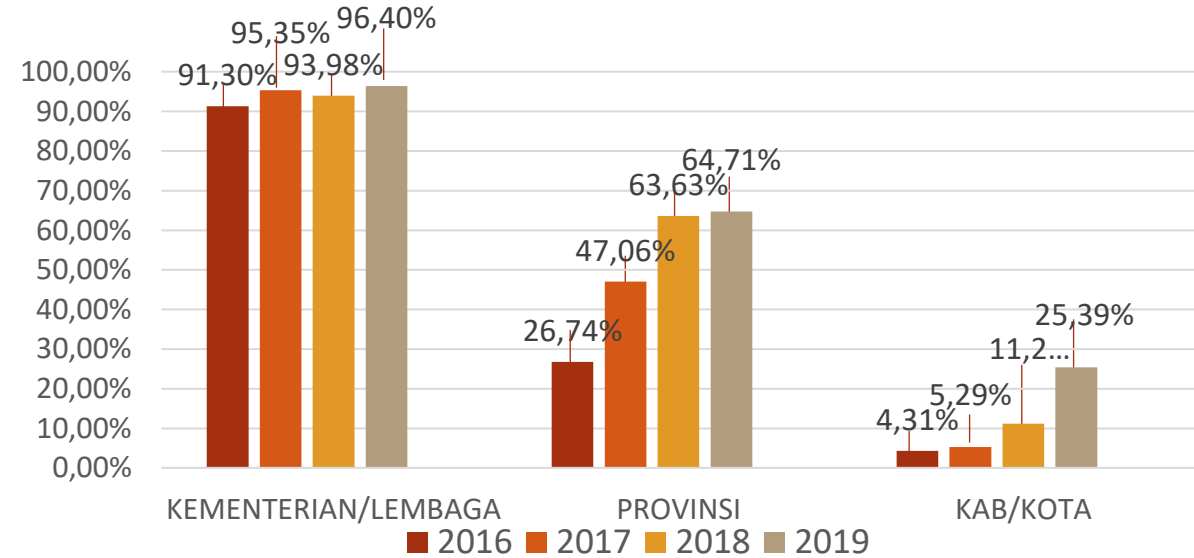
Memastikan program reformasi birokrasi di daerah sesuai dengan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden

# Capaian Reformasi Birokrasi Nasional (2016-2019)

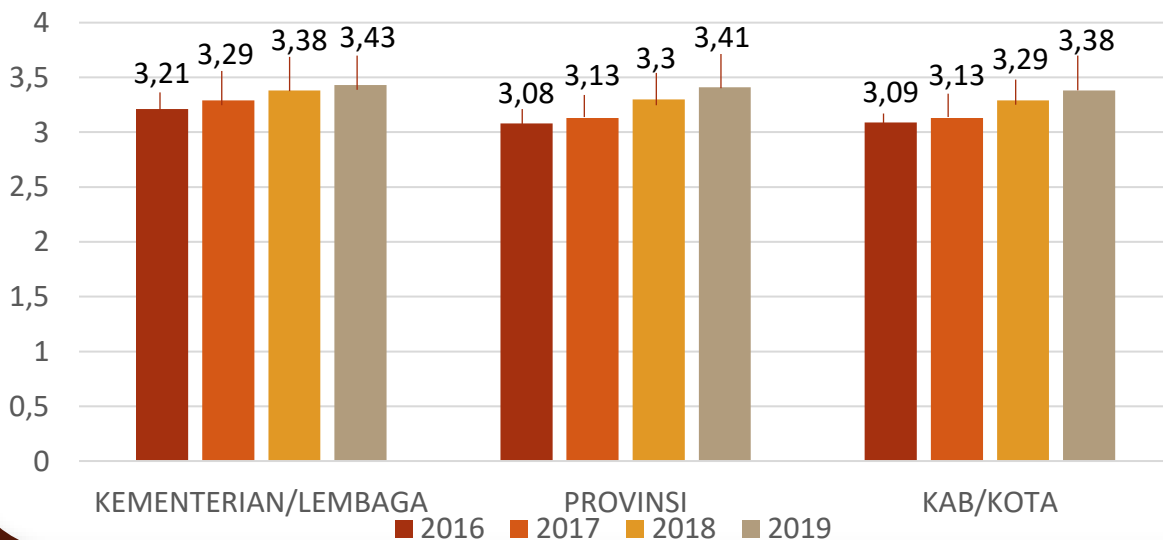
## RATA-RATA INDEKS RB NASIONAL



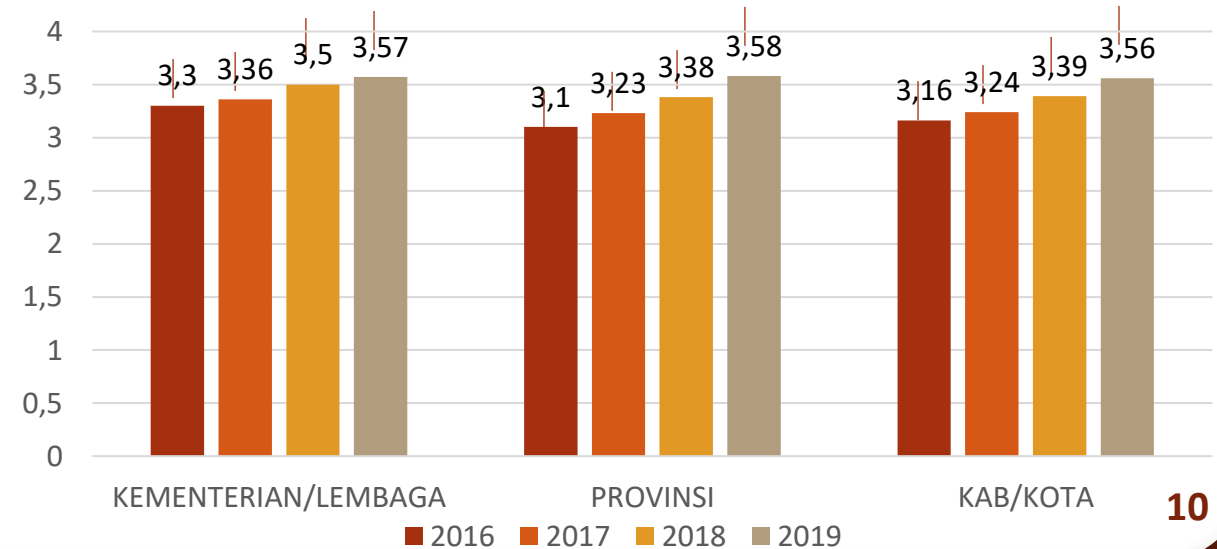
## INSTANSI PEMERINTAH DENGAN RB BAIK



## INDEKS PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK

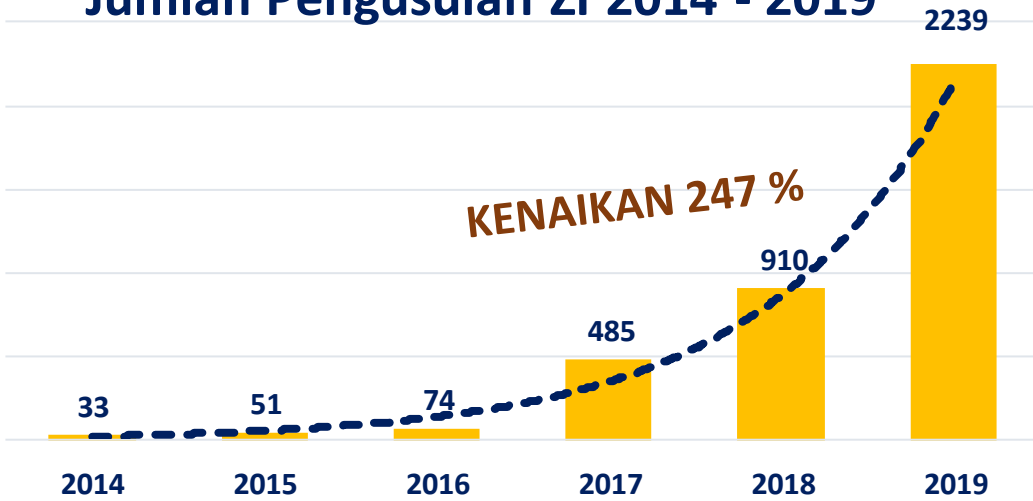


## INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI



# CAPAIAN PEMBANGUNAN ZI

## Jumlah Pengusulan ZI 2014 - 2019

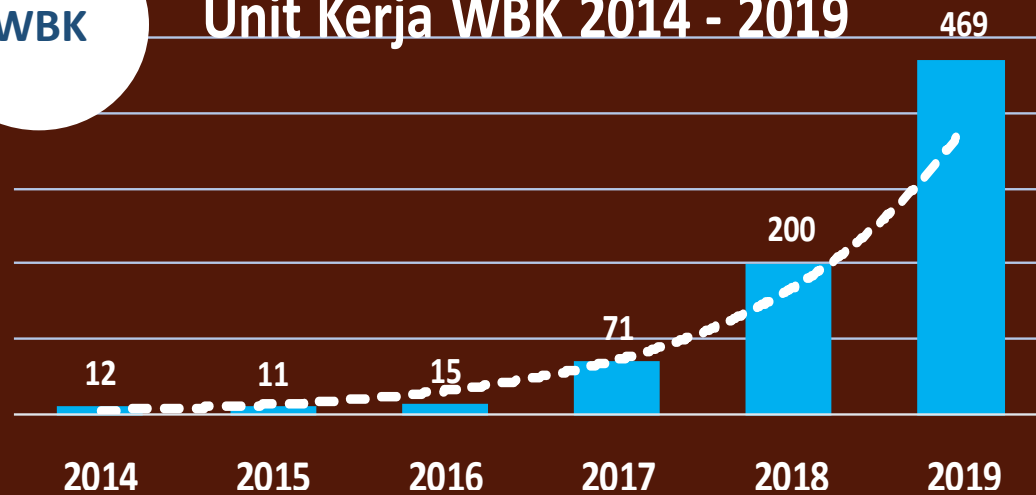


Saat ini telah terdapat **57** unit kerja **WBBM** dan **778** unit kerja **WBK**, yang terdiri atas kantor – kantor:

- Kepolisian
- Kejaksaan
- Pengadilan
- Imigrasi
- Pertanahan
- Rumah Sakit
- Pelayanan Pajak
- Lapas
- Rutan
- Pelayanan Perbendaharaan Negara
- Pelayanan Bea dan Cukai
- Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Dinas Perizinan
- Otoritas (Bandar Udara dan Pelabuhan)
- Karantina (Pertanian, Kelautan, Kesehatan) dan lain-lain

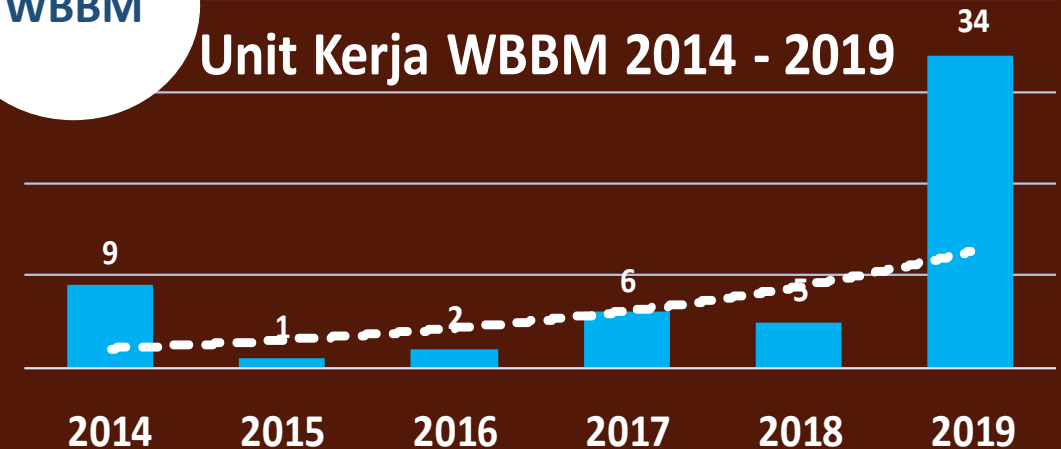
WBK

## Unit Kerja WBK 2014 - 2019



WBBM

## Unit Kerja WBBM 2014 - 2019





# TERIMA KASIH



[kempanrb](#)



[kemenpanrb](#)



[Kementerian-PANRB](#)

**DISCLAIMER:**

This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party without the consent and prior approval of the Author.



# CURRICULUM VITAE

**NAMA** : TJAHO KUMOLO  
**TEMPAT, TGL LAHIR** : SOLO, 1 DESEMBER 1957  
**ALAMAT** : JL. POTLOT II NO. 14 DUREN TIGA – JAKARTA SELATAN

## **PENDIDIKAN**

- TAMAT FAKULTAS HUKUM UNDIP 1985
- LEMHANNAS RI 1993

## **JABATAN KABINET INDONESIA MAJU TAHUN 2019-2024:**

- MENTERI PANRB RI

## **JABATAN KABINET KERJA TAHUN 2014-2019:**

- MENTERI DALAM NEGERI RI
- KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN RI
- WAKIL KETUA KOMPOLNAS RI
- PLT. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
- PERNAH MENTERI PERTAHANAN RI AD. INTERIM

## **RIWAYAT JABATAN LAIN:**

1. 2014 : KETUA TIM SUKSES CAPRES-CAWAPRES BP JOKOWI – BP JUSUF KALLA
2. 2010-2015 : SEKJEN DPP PDI PERJUANGAN
3. 2010-2016 : KETUA FRAKSI PDI PERJUANGAN DPR RI
4. 2005 : KETUA DPP PDI PERJUANGAN
5. 1999 : DIREKTUR SDM DPP PDI PERJUANGAN
6. 1987-2014 : ANGGOTA DPR - MPR RI (6 PERIODE JABATAN)
7. 1984-1992 : KETUA KNPI JAWA TENGAH - SEKJEN KNPI PUSAT - KETUA UMUM KNPI PUSAT
8. KETUA PUSAT PPM, DEWAN PENASEHAT FKPPi PUSAT, SEKRETARIS MKGR JATENG, AMPI JATENG, DHN45 PUSAT, DEWAN FILM, ANGGOTA IDF BAPPENAS RI